

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa

Wahyu

Email : wahyu_ak@gmail.com

Mahasiswa Prodi Akuntansi STIEM Bongaya, Makassar, Indonesia

Marwah Yusuf

Email : marwah.yusuf@stiem-bongaya.ac.id

Anwar

Dosen Prodi Akuntansi STIEM Bongaya, Makassar, Indonesia

Corresponding Author:

Nama author: Wahyu. HP :

e-mail : wahyu_ak@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.70178/icbrj.v4i3.138>

*Received: 01 April 2025, Revised: 07 April 2025, Accepted: 15 Juni 2025:
Published: 30 Juni 2025*

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the influence of budget target clarity and reporting systems on the performance accountability of government agencies. A survey was conducted among 44 officials in Regional Apparatus Organizations (APOs) in Gowa Regency. The data collection method used a questionnaire, and the analysis method used multiple regression analysis.*

The results indicate that budget target clarity has a negative but insignificant effect on the performance accountability of government agencies. The reporting system has a negative but insignificant effect on the performance of government agencies.

Keywords: *Budget target clarity, reporting system, government agency performance accountability*

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Survey dilakukan pada pejabat di Organisasi Perangkat Daerah berbentuk Dinas se Kabupaten Gowa yang berjumlah 44 orang. Metode pengumpulan dan menggunakan kuesioner, dan metode analisis menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci : Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

I. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-

masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, Herawaty(2011). Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006). Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktifitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja menejer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggung jawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpanan terhadap anggaran (Arifin W, 2017).

Penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Fenomena akhir-akhir ini, terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran dan sistem pelaporan di suatu instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah dan sistem pelaporan yang kurang efektif kerap terjadi dan muncul kepermukaan sehingga masyarakat seringkali mempertanyakan kinerja pemimpin daerah. Berbagai kasus terkuak ke publik dan terjadi di kotakota besar yang mengindikasikan kota-kota lainnya berpotensi pula terjadi penyimpangan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah kab.Gowa dalam mengetahui tolak ukur kinerja pemerintah kab.Gowa. baik dari segi kejelasan sasaran anggaran yang secara umum di Indonesia telah menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah maupun dari segi sistem

pelaporan yang juga semua pemerintahan yang bukan hanya di Indonesia saja melainkan hampir diseluruh dunia yang kinerja pemerintahannya dipengaruhi oleh sistem pelaporan akuntansinya.

II. TINJAUAN TEORITIS

1. Kejelasan sasaran anggaran

Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks Pemerintah Daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat (Hidayattullah & Herdjiono, 2014).

Bulan (2011) menyatakan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan dan sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
- b. Terukur. Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
- c. Menantang tapi realistis. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.
- d. Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya.
- e. Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Syafrial, 2011)

2. Sistem pelaporan

Menurut Yuniarti (2015) mengemukakan sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Menurut Paramitha dan Gayatri (2016) mengemukakan sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Hidayattullah dan Irine (2015)

mengemukakan sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Paramitha dan Gayatri, 2016).

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Wahyuni 2013). Dengan adanya sistem yang baik diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang baik tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut, relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat diukur, dan konsisten. Untuk lebih jelasnya masing-masing kriteria akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Relevan, Informasi yang relevan berkaitan dengan sejauh mana informasi tersebut dapat membuat perbedaan untuk Alternatif pengambilan keputusan.
- b. Akurat, Keakuratan informasi berkaitan dengan ketepatan dan keandalan informasi tersebut sehingga informasi yang akurat, berarti bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pemakai informasi
- c. Tepat waktu (Real Time), Ketepatan waktu sebuah informasi sangat penting, karna informasi tersebut harus tersedia pada saat dibutuhkan karna berhubungan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan.
- d. Ringkas, Keringkasan sebuah informasi berarti informasi tersebut sudah digolongkan dan disajikan dalam format yang tidak terlalu detail sehingga tidak membingungkan para pemakai informasi.
- e. Jelas, Informasi yang jelas menunjukan tingkat kemampuan informasi tersebut sudah digolongkan dan disajikan dalam format yang tidak terlalu detail. (Menurut Bodnar dan Hopwood (2011:1)

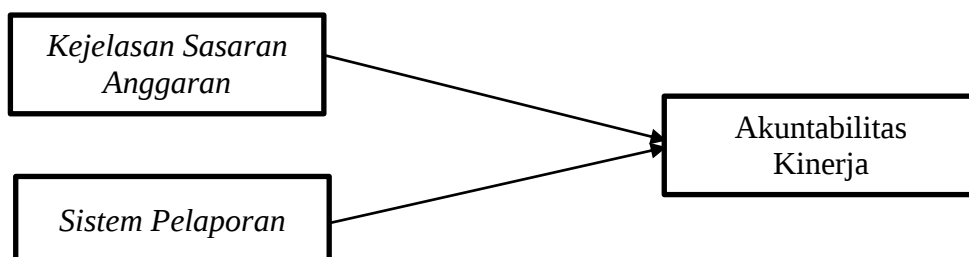
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Paramitha dan Gayatri, 2016). Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, obyektif, dan transparan (Arifin W, 2012).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-

konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerbility*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah, Djalil (2014: 63).

Kerangka Konsep



Hipotesis

H_1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

H_2 : Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

III. METODOLOGI

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasi, industri atau perspektif yang lain. Survey dilakukan pada pejabat di OPD berbentuk di Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berjumlah 44 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Variabel penelitian terdiri dari kejelasan sasaran anggaran (X1) dan sistem pelaporan (X2) sebagai variabel independen dan akuntabilitas kinerja (Y) sebagai variabel dependen. Pengukuran setiap variabel penelitian dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Pengukuran variabel

No	Variabel	Indikator
1	Kejelasan sasaran anggaran (X1)	1). Hasil akhir, 2). Spesifik, 3). Terukur, 4) Realistis, 5). Aktivitas
2	Sistem pelaporan (X2)	1). Akurat, 2) Relevan, 3) Tepat waktu, 4) Ringkas, 5) Jelas

3	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y)	1). Perencanaan stratejik, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4) Perjanjian kinerja, 5) Pengelolaan kinerja, 6) Review dan evaluasi kinerja
---	---	---

Metode untuk menganalisis data menggunakan metode regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = X1\beta_1 + X1\beta_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Akuntabilitas kinerja
X1 : Kejelasan sasaran anggaran
X2 : Sistem pelaporan
 β_1, β_2 : Koofisien regresi
e : error

Hasil

Hasil analisis data menggunakan regresi berganda dapat diuraikan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Analnsisi Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	21.128	4,372	4,833	0.000
Kejelasan sasaran anggaran (X1)	-0,144	0,203	0,709	0.482
Sistem pelaporan (X2)	-0,189	0,251	0,754	0.455
Dependent varaibael (Y)	Akuntabilitas kinerja			

Sumber: (SPSS, Data diolah 2024)

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS version 22, maka diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 21.128+ 0.144X_1 + 0.189X_2 + \varepsilon$$

IV. PEMBAHASAN

1. Pengaruh kejelasan sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kejelasansasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelasnya sasaran anggaran dalam mengelola sebuah

anggaran sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja dan juga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran bukan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kualitas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan banyak faktor-faktor yang lebih dominan untuk menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan secara individu mayoritas responden pada instansi OPD Pemerintah Gowa yang masih belum sepenuhnya paham dengan kejelasan sasaran anggaran untuk meningkatkan AKIP pemerintah Kabupaten Gowa.

Dari hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nety Herawaty (2011) yang dilakukan pada pemerintah daerah kota Jambi dan penelitian dari Rio Pratama dkk (2019) dimana pada penelitian itu juga terdapat variabel kejelasan sasaran anggaran yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kemudian penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan Yulia Cantika (2018) pada instansi pemerintah Kab. Polewali Mandar juga oleh Siti Ruri Suhaesti (2016) pada instansi pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam kedua penelitian tersebut memperoleh hasil variabel Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. Pencapaian kinerja bisa pula terkait dengan motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

2. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan demikian hipotesis ketiga diolak. Hal ini berarti semakin tingginya tingkat sistem pelaporan tidak akan mempengaruhi terhadap semakin tingginya tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian yang tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh suatu kondisi dimana pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan sistem pelaporan yang telah ada untuk mengembangkan atau meningkatkan akuntabilitas kinerjanya untuk lebih baik lagi kedepannya. Seperti misalnya adanya sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup juga sistem pelaporan yang mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan juga akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Eko Setiawan (2013), Risma Putri Wulandari (2009), dan Prasetyo Aji (2012). Dimana pada penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan yang menyebutkan bahwa variabel sistem pelaporan secara negative atau tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini pula tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reyhan Hady Fauzan (2017) pada SKPD kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat, Hidayatullah (2015) pada SKPD Kabupaten Marauke. Dimana pada kedua penelitian tersebut mendapat kesimpulan bahwa

sistem pelaporan berpengaruh positif atau signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

REFERENSI

- Bitar, Anggaran-pengertian, Tipe, Tujuan, Manfaat, Jenis, Contoh, Para Ahli, Melalui <www.gurupendidikan.co.id/anggaran/tipe/tujuan/manfaat/jenis/contoh/paraahli>(16 april 2021)
- Deddi Nordiawan & Ayuningtyan Hertianti, (2018) Akuntansi Sektor Publik, Edisi Dua, jakarta : Salemba Empat
- Faishol, Ahmad. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. 1(3): 205-212.
- Hafza Eka Putri, (2019), Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru), Skripsi. Riau : Universitas Islam Negri Syarif Kasim.
- Hasma, Pemkab Gowa Terus Tingkat Kualitas SAKIP Menuju BB, Melalui <www.gowakab.go.id/pemkab-gowa-terus-tingkat-kualitas-sakip-menuju-bb>(20 april 2021)
- peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 (wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupalaporan anggaran SKPD)
- Rio Pratama dkk, (2019), Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Reyhan Hadi Fauzan,(2017), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluhan Kota Provinsi Sumatera Barat).
- UU RI, Nomor. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wahid, Imam. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja 116 Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agama). JOM Fekon. 3(1): 2457-2471.
- Yulia Cantika, (2019), Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru), Skripsi, Makassar : Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin.

- Zakiyudin, M. Ali dan Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. 2(1): 89-96.
- Zarinah, Monik., Darwanis., dan Syukriy Abdullah. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Peyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 5(1): 90-97.
- Eko Setiawan. (2013). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian Akuntansi dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. *Jurnal ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi : Universitas Riau*.
- Siti Ruru Suhaesti. (2016). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Kabupaten Bengkalis). *Fakultas Ekonomi : Riau University*